

RENCANA KERJA KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. Latar Belakang

1. Kondisi Umum

Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Era Revolusi 4.0, keamanan dalam negeri juga kini menghadapi ancaman berdimensi teknologi siber (*Cyber Crime*). Dalam interaksi antar manusia dengan adanya teknologi digital menjadi lebih cepat, massif dan lebih penetratif. Kondisi tersebut berdampak pada situasi ketidakteraturan arus informasi yang berimplikasi pada semakin membawa masyarakat terjebak pada fenomena *post truth* dengan adanya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian (*hate speech*).

Ancaman keamanan berdimensi Teknologi dan Informasi saat ini juga berkorelasi dengan ancaman berdimensi ideologi dan politik global bersifat transnasional yang berpotensi mengganggu kondisi Keamanan Dalam Negeri antara lain penyebaran ideologi radikalisme dan paham-paham lainnya yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila.

Arah pembangunan Kabupaten Mempawah fokus pada transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung 8 arah kebijakan, salah satunya adalah penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrim. Selain itu untuk menjaga kesinambungan, dalam RPJMD Kabupaten Mempawah masih melanjutkan 7 prioritas nasional yang dituangkan dalam major projects, salah satunya terdapat revitalisasi industri dan penguatan riset terapan yang mendukung kawasan industri prioritas dan smelter

Polres Mempawah sebagai bagian dari fungsi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mewujudkan Keamanan Dalam Negeri dengan menjaga dan memelihara Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) khususnya di Kabupaten Mempawah harus mampu bersikap responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi melalui berbagai strategi dan program pemolisian untuk mewujudkan keamanan di Kabupaten Mempawah demi

terselenggaranya Pembangunan Daerah. Pelaksanaan tugas Polri telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup signifikan dengan ditandai banyaknya pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Keberhasilan yang dicapai oleh Polres Mempawah tersebut merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polres Mempawah dengan didukung oleh eksekutif, legislatif, yudikatif dan partisipasi masyarakat serta berbagai stakeholders yang terkait dengan tugas kepolisian. Sejauh ini apresiasi yang positif atau kritik yang membangun terhadap kinerja Polres Mempawah dari pemerintah daerah /swasta/ masyarakat akan dijadikan tantangan bagi Polres Mempawah dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya guna mencapai keberhasilan yang lebih baik pada masa mendatang.

Polres Mempawah telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Polres Mempawah T.A. 2024, merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Polres Mempawah Tahun 2020–2024.

Rencana Kerja (Renja) Polres Mempawah T.A. 2024 memuat arah kebijakan dan strategi demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana, sistematis dan tanggap akan perubahan. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Polres Mempawah T.A 2024 sejalan dengan Program Prioritas Kapolri dalam Transformasi Menuju Polri Yang Presisi.

Perkembangan dan perubahan yang terjadi di Kabupaten Mempawah masyarakat merupakan bahan masukan yang harus diperhitungkan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Polres Mempawah T.A. 2024. Perubahan tersebut meliputi perkembangan lingkungan strategis meliputi aspek kehidupan masyarakat di daerah Kabupaten Mempawah yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan (Ipoleksosbudkam).

Selanjutnya kondisi eksternal dan internal Polres Mempawah yang dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan lingkungan strategis tersebut dianalisa melalui pendekatan SWOT yang digambarkan sebagai berikut:

a. Perkembangan Lingkungan Strategi Kabupaten Mempawah

1) Geografi

Kabupaten Mempawah adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat yang terletak diantara pada 0°42' lintang Utara dan 0°00,4' Lintang Selatan serta 108°34' Bujur Timur dan 109°22' Bujur Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Mempawah adalah :

- a. Utara : Kab. Mempawah
- b. Selatan : Kab. Kubu Raya dan Kota Pontianak
- c. Timur : Kab. Landak
- d. Barat : Laut Natuna dan Selat Karimata

Luas Kabupaten Mempawah sebesar 2.797,88 km². Daerah Pemerintahan Kabupaten Mempawah terdiri dari 9 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 60 Desa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sadaniang dengan luas 453,58 km² atau 16,21% sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Anjongan dengan luas sebesar 124,079 km² atau 4,43% dari luas wilayah Kabupaten Mempawah.

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas (Km ²)
1.	Jongkat	Jongkat	408,256
2.	Segedong	Parit Bugis	260,598
3.	Sui. Pinyuh	Sui. Pinyuh	265,840
4.	Anjongan	Anjungan Melancar	124,079
5.	Mempawah Hilir	Terusan	398,420
6.	Mempawah Timur	Antibar	199,447
7.	Sui. Kuyit	Sui. Kuyit Laut	442,790
8.	Toho	Toho	244,873
9.	Sadaniang	Pentek	453,578
JUMLAH LUAS KABUPATEN MEMPAWAH			2797,880

(1) Daratan

Sebagian besar luas tanah di Kabupaten Mempawah adalah penggunaan lainnya (35,89%) dan lahan perkebunan (23,32%).

Adapun areal penggunaan lainnya terluas terletak di Kecamatan

Sadaniang seluas 9.708 Ha, sedangkan luas lahan perkebunan terluas berada di Kecamatan Sungai Pinyuh yaitu seluas 4,475 Ha.

Dari 127,69 ribu Ha luas Kabupaten Mempawah, areal untuk pemukiman hanya bekisar 8,95%. Adapun areal pemukiman terluas berada di Kecamatan Sungai Kunyit diikuti kemudian oleh Kecamatan Segedong dan Kecamatan Mempawah Hilir.

(2) Air laut:

Wilayah Kabupaten Mempawah dialiri oleh Sungai Mempawah dan beberapa muara sungai (estuary) kecil serta terdapat pelabuhan internasional Terminal Kijing yang terletak di Kecamatan Sungai Kunyit.

2) Demografi

Penyebaran penduduk di Kabupaten Mempawah tidak merata antar kecamatan yang satu dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Sungai Pinyuh merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu 231 jiwa/km². Sebaliknya, Sadaniang dengan luas sekitar 16,75% dari total wilayah Kabupaten Mempawah hanya dihuni 27 sampai 28 jiwa/km².

Penduduk Kab. Mempawah yang berada di Daerah Hukum Polres Mempawah menurut jenis kelamin yaitu sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Siantan	51.493
2.	Segedong	26.970
3.	Sui. Pinyuh	63.331
4.	Anjongan	21.417
5.	Mempawah Hilir	46.469
6.	Mempawah Timur	35.064
7.	Sui. Kunyit	29.248
8.	Toho	24.502
9.	Sadaniang	12.433
Kabupaten Mempawah		310.927

Seiring dengan berkembangnya lingkungan strategis yang berdampak pada meningkatnya potensi ancaman dan gangguan keamanan dalam bentuk kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan merugikan kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi serta makin tingginya tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme Polri, maka tugas Polri pada tahun 2024 diprediksi akan semakin berat.

3) Sumber Daya Alam
(1) Kehutanan

Kabupaten Mempawah dengan luas kawasan hutan sampai dengan tahun 2024 sekitar 0,15 juta Ha merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas yaitu sekitar 1,65% dari luas kawasan hutan Provinsi Kalimantan Barat.

Pada tahun 2024, luas kawasan hutan Kabupaten Mempawah berdasarkan data Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mempawah terdiri dari 2,93% hutan lindung; 11,78% hutan produksi terbatas; 35,13% hutan produksi biasa; 1,62% hutan produksi konversi; dan 48,54% areal penggunaan lain.

Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Mempawah

No	Jenis Kawasan Hutan	Luas (Ha)
1	Hutan Suaka/Cagar Alam	-
2	Hutan Lindung	4.300
3	Hutan Lindung Gambut	-
4	Hutan Lindung Bakau	-
5	Hutan Produksi Terbatas	17.263
6	Hutan Produksi	51.492
7	Hutan Produksi Konversi	2.367
8	Areal Penggunaan Lain	72.737
Jumlah		148.154

(2) Pertambangan

Di sektor pertambangan Kabupaten Mempawah memiliki potensi pertambangan seperti Gambut, Gas Methan (CH₄), Kaolin, Antimoni (Sb), Andesit / Dasit (AM), Granit / Diorit, Pasir Kuarsa, Emas (Au), Timah Hitam (Pb), Pasir Besi (Fe) / Bauksit, Tembaga (Cu) dan lain-lain yang masih belum tereksplorasi secara optimal.

4) Idiologi

- a) Penanaman, pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 tetap disosialisasikan dan diprogramkan secara berjenjang dan bertahap oleh Pemda baik untuk wilayah pedalaman maupun pesisir pantai;
- b) Adanya masyarakat perbatasan yang berorientasi ke Negara Jiran / ketetangga Kuching / Sarawak, tetapi hal tersebut lebih didominasi faktor ekonomi dan kekerabatan dan belum dapat sepenuhnya dikategorikan sebagai kurangnya semangat Nasionalisme, secara umum masyarakat perbatasan tetap cinta Indonesia dan menyeberang ke Negara tetangga hanya mencari nafkah.
- c) Di Kabupaten Mempawah saat ini belum ditemukan adanya gerakan yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang menuntut/menghendaki untuk mengganti faham Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara.

5) Politik

- a) Pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional akan dilakukan tahun 2024 bersamaan dengan Pileg dan Pilpres, sehingga adanya kekosongan jabatan maka untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati akan diangkat Plt dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b) Perubahan yang signifikan dalam bidang politik dan pemerintahan saat ini telah merubah penyelenggaraan

pemerintahan di daerah, yaitu yang ditandai dengan dimulainya proses penyelenggaraan Otonomi Daerah memerlukan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur yang mampu mengadaptasi perubahan serta dapat memberikan pelayanan publik yang memadai. Dalam menghadapi perubahan dan tuntutan masyarakat tersebut, penataan daerah otonom masih belum mampu dilakukan secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada;

- c) Kondisi stabilitas politik di Kabupaten Mempawah secara umum sangat kondusif akan tetapi kondisi politik pada tingkat supra struktur antara lembaga legislatif dengan eksekutif belum optimal dalam memperankan fungsi politiknya;
- 6) Ekonomi
- a) Perekonomian Kabupaten Mempawah menunjukkan kemajuan, karena adanya kebijakan pembangunan yang didukung oleh instrumen perencanaan yang mengacu pada potensi daerah menjadi salah satu faktor yang berperan dalam mendorong kemajuan tersebut;
 - b) Keberadaan industri kecil menengah dan industri besar/sedang di Kabupaten Mempawah memiliki nilai strategis, mengingat kegiatan industri tersebut menyerap cukup banyak tenaga kerja sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Mempawah. Oleh karenanya, pengembangan industri mendapat perhatian ekstra dari Pemerintah Daerah;
 - c) Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Bupati tidak bisa lagi mengeluarkan Ijin usaha Pertambangan, dengan tidak adanya kewenangan Bupati dalam mengeluarkan ijin usaha Pertambangan (IUP) dapat berdampak pada menurunnya PAD di Kabupaten.

- d) Dibidang pertanian masyarakat masih bercocok tanam secara tradisional terutama didaerah pedalaman dengan membakar hutan dan melakukan perladangan secara berpindah – pindah yang hasilnya belum dapat mencukupi daerah Kabupaten Mempawah.
- e) Usaha pengembangan budidaya perikanan air tawar, tambak dan laut sudah optimal ditandai dengan adanya penyediaan bahan baku pakan ikan, benih ikan unggul, jaringan irigasi dan pemasaran, akses permodalan, serta penyuluhan tentang mekanisme dan system pengelolaan budidaya perikanan;
- f) Di sektor transportasi darat, panjang jalan yang tersedia sangat memprihatinkan, dan merupakan salah satu kendala utama dalam hal pengembangan wilayah. Banyak sekali ruas jalan yang harus diperbaiki ataupun dibuat baru, yang sampai saat ini terkendala pada tiadanya biaya yang cukup untuk menuntaskannya;
- g) Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan dapat menjangkau sampai ke Kecamatan dan Desa;
- h) melakukan pengawasan yang ketat penggunaan Dana Desa guna menunjang pembangunan di daerah dan menghindari penyimpangan penggunaannya;
- i) Ketenagakerjaan
 - (1) membaiknya berbagai perusahaan akan membantu mengurangi angka pengangguran;
 - (2) penyebab masih tingginya angka pengangguran, antara lain :
 - (a) Bertambahnya pengangguran usia muda akibat putus sekolah;
 - (b) Pengangguran tahun sebelumnya yang belum terserap pasar kerja;

- (c) Angkatan kerja baru;
 - (d) Pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
 - (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum menjamin keseimbangan kepentingan antara pengusaha dan tenaga kerja, sehingga ada kecenderungan resistensi dari pihak tenaga kerja untuk mendesak direvisinya UU ini.
 - (4) Rekapitulasi UMP / UMK Kab. Mempawah tahun 2015 (berdasarkan Keputusan Gubernur Kalbar No 505/Disnakertrans/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang penetapan upah minimum provinsi (UMP) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 Kab. Mempawah Rp. 1.575.000,-
- 7) Sosial Budaya
- a) Kondisi sosial budaya Kab. Mempawah saat ini pada umumnya relatif baik. Kondisi ini ditandai dengan semakin kokohnya persatuan dalam keragaman, tumbuhnya suasana kehidupan yang penuh toleransi, berkembangnya budaya damai dan kemauan menyelesaikan masalah dengan tanpa kekerasan, serta kondusifnya interaksi antarbudaya. selain itu juga terjadi penguatan peranan kearifan lokal dalam bingkai nasional serta peningkatan pemahaman terhadap keragaman sosial budaya sehingga kondusifnya interaksi antarbudaya secara positif dan konstruktif;
 - b) Kehidupan masyarakat Kab. Mempawah dalam bidang agama, terutama yang berkenaan dengan kesadaran melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat tampak beragam dan mengalami peningkatan yang bervariasi;
 - c) Pendidikan;
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 31 dan UU No 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu prinsip gerakan reformasi dalam pendidikan adalah pendidikan diselenggarakan

- dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan di Kab. Mempawah masih dihadapkan pada persoalan : Pemerintah masih belum optimal menangani masalah berkaitan dengan akses dan fasilitas pendidikan di Kab. Mempawah khususnya bagi lembaga pendidikan yang berdomisili di daerah pedalaman yang memiliki keterbatasan akses pendidikan;
- d) pembangunan sektor kesehatan masih dihadapkan permasalahan kenaikan iuran BPJS, disparitas status kesehatan, beban ganda penyakit, kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan yang minim, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat. Perilaku dan pola hidup masyarakat pada umumnya belum peduli terhadap masalah kesehatan, telah menyebabkan berkembangnya berbagai wabah penyakit menular, seperti: virus wabah *Covid-19*, demam berdarah (DBD), TBC, flu burung (AI), HIV/ AIDS, muntaber, diare, rabies, chikungunya, anthrax, stunting dan lain-lain;
 - e) Potensi pariwisata diKab. Mempawah banyak memiliki objek yang bisa dijual dan menjadi destinasi menarik bagi wisatawan lokal maupun asing, namun belum terkelola dengan baik;
 - f) Masalah pertanahan akan terus menjadi permasalahan yang berkembang dimasyarakat, baik daerah perkotaan maupun di daerah yang baru berkembang, baik daerah pemukiman, didaerah pertanian / perkebunan maupun daerah industri dan pertambangan;
 - g) Tidak tersedianya lapangan kerja didaerah pedesaan, sehingga banyak penduduk yang melakukan urbanisasi ke Kota dengan harapan dapat hidup layak, kondisi ini akan berdampak terhadap potensi gangguan dan ambang gangguan di Kota;
 - h) kemajuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap pola hidup masyarakat Kab. Mempawah;

- 8) Pertahanan dan Keamanan
- a) Kesatuan TNI / POLRI terdiri dari :
 - (1) TNI AD : Kodim = 1, Batalyon 643 Anjongan = 1, Batalyon Zipur Anjongan = 1, Batalyon Kavaleri, = 1, Koramil = 9.
 - (2) TNI AL : Marhanlan = 1
 - (3) POLRI : POLRI : Polres = 1, Polsek Urban = 1, Polsek Rural = 4, Polsek Prarural = 3, Polsubsektor = 2.
 - b) Tindak pidana dan pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota TNI/POLRI relatif kecil.
 - c) Kondisi keamanan dan ketertiban Daerah Hukum Polres Mempawah relatif stabil, hal ini ditandai dalam beberapa tahun terakhir tidak ada kerusuhan sosial yang bernuansakan SARA dan tindakan pelanggaran hukum yang menimbulkan dampak keresahan sosial yang bersifat massif. Sedangkan tindak kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional, kejahatan atas kekayaan negara, dan kejahatan yang bersifat kontijensi masih berpotensi terjadi di Daerah Hukum Polres Mempawah.
 - d) Beberapa kasus menonjol (*Crime Index*) yang mempunyai dampak meresahkan masyarakat dan memerlukan perhatian khusus antara lain :
 - (1) Penganiayaan Berat.
 - (2) Pencurian dengan pemberatan.
 - (3) Pencurian dengan kekerasan.
 - (4) Pencurian Ranmor .
 - (5) Perkosaan.
 - (6) Pembakaran / kebakaran.
 - (7) Perjudian.
 - (8) Narkoba.
 - (9) Penyelundupan.
 - (10) Penggelapan.
 - (11) Pemalsuan Mata Uang.

e) Situasi Kamtibmas Polres Mempawah tahun 2022 – Juli 2023:

(1) kejahatan dan pelanggaran

NO	JENIS GANGGUAN KAMTIBMAS	LAPOR		SELESAI		%	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	KEJAHATAN						
	KONVENSIONAL	152	90	142	79	93	88
	TRANSNASIONAL	61	29	60	30	98	103
	THD KAYA NEG	11	2	3	6	27	300
	IMPL KONTINJ	0	0	0	0	0	0
	GAR HAM	0	0	0	0	0	0
TOTAL JLH KEJAHATAN		224	121	205	115	92	95
2	PELANGGARAN						
	NON PIDANA						
	PIDANA						
TOTAL JLH GAR							
3	BENCANA						
	BENCANA ALAM						
	BENCANA SOS						
	BENCANA NON ALAM						
TOTAL JLH BENCANA							
TOTAL JLH GUAN KMTIBMS							

(2) Pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas tahun 2022 – Juli 2023:

NO	URAIAN	TAHUN 2022	Juli 2023	TREND
1	2	3	4	5
1	JUMLAH LAKA LANTAS	159	81	T.78
2	PENYELESAIAN LAKA	97	51	T.46
3	PERSENTASE SELESAI LAKA	61%	63%	N.2%
4	KORBAN MD	28	24	T.4
5	KORBAN LB	156	97	T.59
6	KORBAN LR	95	41	T.54
7	RUGMAT	696.600.000	793.200.000	N. 96.600.000
8	JUMLAH TABRAK LARI	21	5	T.16
9	KORBAN MD	6	6	TETAP
10	KORBAN LB	16	10	T.6
11	KORBAN LR	4	4	TETAP
12	RUGI MATERIAL	29.050.000	24.450.000	T.4.600.000
13	JUMLAH GAR LANTAS	2.230	3.507	N.1.227
14	SELESAI GAR LANTAS	2.230	3.507	N.1.227
15	PERSENTASE SELESAI GAR LANTAS	100%	100%	

- f) Persentase penyelesaian perkara pada tahun 2022 sebesar 92% dan 95% sampai pada bulan Juli tahun 2023. Integritas dan komitmen yang menjadi dasar dari para penyidik dalam penyelesaian perkara demi mewujudkan pelayanan prima dan meningkatkan rasa keadilan kepada masyarakat.
- g) Persentase penyelesaian perkara laka lantas pada tahun 2022 sebesar 61% dan 63% sampai pada bulan Juli tahun 2023.

2. Analisis

Dari perkembangan dan perubahan lingkungan strategis di Kalimantan Barat tersebut diatas dilakukan analisa **SWOT (*Strenghts, Weaknesses, Opportunities dan Threats*)** :

1) Kekuatan (*Strenghts*)

- a) Polres Mempawah memiliki pelaksana tugas kewilayahan sebanyak 8 Polsek dan 2 Polsubsektor:
- (1) Polsek Sungai Pinyuh (Urban);
 - (2) Polsek Mempawah Hilir (Rural);
 - (3) Polsek Sungai Kunyit (Rural);
 - (4) Polsek Toho (Rural);
 - (5) Polsek Siantan (Rural);
 - (6) Polsek Segedong (Prarural);
 - (7) Polsek Mempawah Timur (Prarural);
 - (8) Polsek Anjongan (Prarural);
 - (9) Polsubsektor Pasir Wan Salim;
 - (10) Polsubsektor Sadaniang.
- b) Personel Polres Mempawah Juli Tahun 2023
- (1) Kekuatan Personel (Kuantitas).

(a) Polri

Jumlah personel Polri Polres Mempawah dan Polsek Jajaran sesuai DSP sebanyak 1.016 anggota dan Riil sebanyak 456 anggota atau 44,8% dengan perincian :

No.	PANGKAT	DSP	RIIL	PERSENTASE (100%)
1	AKBP	1	1	100%
2	Kompol	5	3	60%

3	AKP	29	10	34,4%
4	Inspektur	190	48	25,2%
5	Bintara	791	394	49,8%
6	Tamtama	-	-	-
Jumlah		1.016	456	44,8%

(b) PNS

Jumlah personel PNS Polres Mempawah dan Polsek Jajaran sesuai DSP sebanyak 60 dan yang terealisasi sebanyak 12 atau 20%.

No.	GOLONGAN	DSP	RIIL	PROSENTASE (100%)
1	IV	-	-	-
2	III	-	2	-
3	II / I	60	10	16%
Jumlah		60	12	20%

c) Pendidikan Personel (Kualitas)

(1) Dik Bang :

(a) Tahun 2020

- Sespimen : Animo = 0 , lulus = 0 ;
- PTIK : Animo = 0 , lulus = 0 ;
- SIP : Animo = 16 , lulus = 0 ;
- PAG : Animo = 7 , lulus = 4 ;

(b) Tahun 2021

- Sespimen : Animo = 0 , lulus = 0 ;
- PTIK : Animo = 0 , lulus = 0 ;
- SIP : Animo = 0 , lulus = 0 ;
- PAG : Animo = 1 , lulus = 1 ;

(c) Tahun 2022

- Sespimen : Animo = 0 , lulus = 0 ;
- PTIK : Animo = 0 , lulus = 0 ;
- SIP : Animo = 1 , lulus = 1 ;

(d) Juli Tahun 2023

- Sespimen : Animo = 0 , lulus = 0 ;
- PTIK : Animo = 0 , lulus = 0 ;
- SIP : Animo = 0 , lulus = 0 ;

(2) Dikbangspes :

(a) Tahun 2020

- Sabhara : 5 ;
- Lantas : 2 ;
- Sat Polair : 1 ;
- Binmas : 6 ;
- Intelkam : 5 ;
- Reskrim : 1 ;

(b) Tahun 2021

- Intel : 4 ;
- Sabhara : 4 ;
- Lantas : 4 ;
- Reskrim : 4 ;
- Binmas : 6 ;

(c) Tahun 2022

- Intel : 2 ;
- Sabhara : 3 ;
- Lantas : 2 ;
- Reskrim : 3 ;
- Binmas : 2 ;

(d) Juli Tahun 2023

- Intel : 2 ;
- Sabhara : 2 ;
- Lantas : 6 ;
- Reskrim : 3 ;
- Binmas : 2 ;
- Polair : 2 ;

d) Dislokasi Personel (koreksi)

Jumlah personel Polri Polres Mempawah dan jajaran sebanyak 456 orang sedangkan PNS sebanyak 12 orang, dengan perincian sebagai berikut:

- a) Kapolres / Waka : 2 POLRI,
- b) Bagops : 11 POLRI, 1 PNS
- c) Bagren : 9 POLRI, PNS
- d) Bag SDM : 12 POLRI, 3 PNS
- e) Baglog : 7 POLRI, PNS
- f) Satintelkam : 23 POLRI, PNS
- f) Satreskrim : 35 POLRI, PNS
- g) Satresnarkoba : 13 POLRI, PNS
- h) Satbinmas : 10 POLRI, PNS
- i) Satlantas : 39 POLRI, 1 PNS

j)	Satsamapta	: 49	POLRI, 1 PNS
k)	Satpolair	: 15	POLRI, 1 PNS
l)	Sattahti	: 10	POLRI, PNS
m)	SPKT	: 11	POLRI, PNS
n)	Siwas	: 4	POLRI, PNS
o)	Sium	: 6	POLRI, 3 PNS
p)	Sikeu	: 5	POLRI, PNS
q)	Sipropam	: 8	POLRI, PNS
r)	Si TIK	: 3	POLRI, PNS
s)	Sihumas	: 4	POLRI, PNS
t)	Sikum	: 3	POLRI, PNS
u)	Sidokkes	: 6	POLRI, PNS
v)	Polsek Sui Pinyuh	: 32	POLRI, PNS
w)	Polsek Mpw Hilir	: 18	POLRI, PNS
x)	Polsek Sui Kunyit	: 21	POLRI, PNS
y)	Polsek Toho	: 17	POLRI, PNS
z)	Polsek Jongkat	: 27	POLRI, 1 PNS
aa)	Polsek Segedong	: 17	POLRI, PNS
bb)	Polsek Mpw Timur	: 17	POLRI, PNS
cc)	Polsubsektor Pasir Wansalim	: 1	POLRI, PNS
dd)	Polsubsektor Sadaniang	:	POLRI, PNS

e) Jumlah Materiil dan fasilitas Polres Mempawah dan Polsek Jajaran Juli Tahun 2023 yang terdiri dari Bangunan Kantor: 11 unit, Rumah dinas : 135 pintu, Bangunan pendukung: 11 unit;

(1) Alkom :

- (a) HT : 358 unit, BB : 341 unit, RR : unit, RB : 17 unit;
- (b) Repeater : 2 unit, BB : 1 unit, RR : 1 unit, RB : unit;
- (c) Radio Mobil : 12 unit, BB : 11 unit, RR : unit, RB : 1 unit;
- (d) Radio Base : 14 unit, BB : 12 unit, RR : unit, RB : 2 unit;
- (e) Conference System : 1 unit, BB : 1 unit, RR : unit, RB : unit;

(2) Amunisi :

- (a) Caliber 38 SPC 6 tajam : 5.368;
- (b) Caliber 38 6 DK : 3.259;
- (c) Caliber 38 6 HP : 805;
- (d) Caliber 5,56 mm 4 tajam : 5.044;
- (e) Caliber 5,56 mm 5 tajam : 9.260;
- (f) Caliber 5,56 mm 4 DK : 4.320;

- (g) Caliber 5,56 mm 5 DK : 2.693;
- (h) Caliber 5,56 mm 4 HP : 4.352;
- (i) Caliber 5,56 mm 5 HP : 1.402;
- (j) Caliber 7,62 mm 11 tajam : 8.426;
- (k) Caliber 7,62 mm 11 DK : 3.935;
- (l) Caliber 7,62 mm 8 tajam : 13.793;
- (m) Caliber 30 mm II Bal : 19.092;
- (n) Caliber 303 mm tajam : 2.738;
- (o) Caliber 7,62 mm 11 hampa: 1.329;
- (p) Caliber 7,62 mm 8 DK SKS : 7;
- (q) Caliber 9x19 mm 1 tajam : 1.969;
- (r) Cartridge Flash Ball : 21;
- (s) Cartridge Flash Ball Caliber 44 mm : 20;
- (t) Caliber 44 mm 53 AR AL (Smoke) : 230
- (u) Caliber 44 mm 53 AR AL (Powder): 215
- (v) Cartridge Gas Air Muda : 556;
- (w) Cartridge Flash Ball : 100
- (x) Caliber 5,56 mm 42 tajam (VS) : 850;
- (y) Caliber 5,56 mm 42 DK (VS) : 300
- (z) Caliber 5,56 mm 42 H (VS) : 250

(3) Senpi :

- (a) Genggam : 270, SP : 170, LP : 100,
- (b) Bahu : 132, SP : 92, LP : 40,
- (c) SMR : 8, SP : 8, LP : 0;

(4) Ranmor :

- (a) Roda 2 : 172 (B : 154, RR : 12, RB : 6);
- (b) Roda 4 : 26 (B : 20, RR : 6, RB : 0);
- (c) Roda 6 : 6 (B : 6, RR : 0, RB : 0);
- (d) Ran air : 6 (B : 5, RR : 1, RB : 0);
- (e) Sepeda : 15 (B : 15, RR : , RB :);

f) Rencana Kerja Polres Mempawah T.A. 2024 mencakup 4 Program dan 31 aktivitas dengan usulan Pagu Indikatif sebesar Rp. 50.742.190.000,-

g) Sistem metode

Tersedianya Standard Operasional Procedure (SOP) yang mengatur Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) di lingkungan Polres Mempawah dan Polsek Jajaran baik itu di bidang Pembinaan, Opsnal maupun lainnya.

2) **Kelemahan (*Weaknesses*)**

- a) Polres Mempawah belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sampai pada komunitas terkecil dikarenakan :
- (1) Jumlah personel Mapolres Mempawah sesuai DSP antara lain Polri = 1.016, Riil = 456, kurang = 560; PNS = 60, Riil = 12, kurang = 48;
 - (2) Terdapat Kecamatan belum terbentuk Polsek:
 - Kec. Sadaniang;
- b) Kemampuan dan keahlian anggota yang bertugas dilapangan masih kurang, khususnya personel yang bertugas di Polsek jajaran yang merupakan ujung tombak pelaksana tugas pokok Polri, demikian juga personel Polri yang mengisi pada Polsubsektor dilapangan dihadapkan tuntutan masyarakat akan pelayanan Polri dirasakan semakin tinggi;
- c) Keterbatasan sarana prasarana serta Peralatan Khusus (Alsus) termasuk peralatan komunikasi untuk mendukung penugasan operasional dilapangan baik pada tingkat satuan di lingkungan Mapolres sampai dengan satuan ditingkat yang paling bawah (Polsek / Polsubsektor) dihadapkan tuntutan masyarakat akan kehadiran anggota Polri secara cepat, tepat, kapan saja dan dimana saja;
- d) Masih adanya perilaku menyimpang atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum anggota Polri dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi kepolisian;
- e) Kualitas pelayanan Polres Mempawah kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan baik dari kuantitas pelayanan, jenis pelayanan dan waktu pelayanan yang memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan dukungan teknologi informasi sehingga mampu mencegah berpotensi KKN atau penyalahgunaan wewenang;

- f) Belum optimalnya pelaksanaan program Perpolisian Masyarakat (Polmas) sehingga masih sangat diperlukan peningkatan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri dilapangan;
- g) Penerapan hukum positif diwilayah jajaran Polres Mempawah yang masih memberlakukan / menerapkan hukum adat oleh masyarakat didaerah tertentu, lebih mengedepankan hukum adat dari hukum positif dalam penyelesaian masalah dan sering dikomersilkan oleh oknum pemangku adat, sehingga menjadi salah satu hambatan / kendala dalam pelaksanaan tugas pokok Polri dalam penegakan hukum;
- h) Penanganan kasus yang menjadi sorotan publik dan tidak ditangani secara optimal, akan menjadi tuntutan dari masyarakat melalui aksi – aksi demonstrasi / unjuk rasa;

3) **Peluang (*Opportunities*)**

- a) Sistem Desentralisasi / Otonomi Daerah yang mendekatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat merupakan faktor penting yang menunjang pelaksanaan tugas Polres Mempawah dan Jajaran;
- b) Kebijakan revolusi mental untuk mewujudkan *good government, clean governance*, anti korupsi dan pelayanan publik yang prima;
- c) Peningkatan anggaran operasional kepolisian dan tunjangan kinerja;
- d) Meningkatnya dukungan anggaran APBD dari tahun ke tahun yang telah dialokasikan dapat digunakan untuk menambah jumlah sarana prasarana serta peralatan khusus (Alsus) Polres Mempawah dan Jajaran;
- c) Adanya kepercayaan masyarakat terhadap Polres Mempawah dalam bentuk partisipasi aktif berupa saran dan masukan serta informasi gangguan Kamtibmas melalui layanan call center (110)

dan pesan singkat maupun secara langsung melalui nomor handphone para pejabat utama Polres Mempawah dan para Kapolsek;

- d) Aktifnya kontrol eksternal dari DPRD, BPK, Komnas HAM dan LSM yang merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap Kinerja Polri dan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Polri dilapangan;
- e) Adanya MoU yang dilaksanakan Polres Mempawah dengan instansi Pemerintah, BUMN dan media massa dalam menjaga Kamtibmas diwilayah Kabupaten Mempawah;

4) **Ancaman (*Threats*)**

- a) Kabupaten Mempawah merupakan jalur strategis yang berpotensi terjadinya pelanggaran hukum dan indikator kriminalitas di Daerah Hukum Polres Mempawah terutama rawan terhadap kejahatan lintas negara (***Transnational Crime***) meliputi :
 - (1) Illegal Trading, Illegal Logging, Illegal Mining, dan Illegal Fishing;
 - (2) Penyelundupan hasil hutan dan hasil perkebunan;
 - (3) Penyelundupan kendaraan;
 - (4) pengaruh budaya / adat istiadat.
- b) Kerusuhan antar etnis, khususnya antara suku Dayak, Melayu dan Madura yang masih mungkin terjadi juga merupakan kerawanan yang perlu diwaspadai.
- c) Adanya giat unjuk rasa dari mahasiswa, LSM, buruh, kelompok islam radikal sebagai reaksi penentangan atau tidak setujunya terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah yang memerlukan kesiapan dan kewaspadaan aparat Kepolisian secara berlanjut;

- d) Meningkatnya investasi sektor pertanian dan perkebunan terutama kelapa sawit membutuhkan lahan yang sangat luas, perijinan lahan untuk perkebunan sawit yang dikeluarkan oleh pemerintah tak hanya lahan kritis dan lahan tandus, namun terdapat hutan masyarakat yang ada kepemilikannya / tanah adat serta ketidakadilan dalam proses pembagian kebun plasma.
- e) Hegemoni demokrasi telah menimbulkan potensi konflik pada masyarakat.
- f) Media sosial pun sering digunakan untuk menyebarkan hoax dan kebencian yang mengganggu stabilitas dan keamanan di Kabupaten Mempawah.
- g) Potensi bencana banjir di Kabupaten Mempawah masih tinggi dan membutuhkan kesiapsiagaan Polri di dalamnya saat terjadi bencana.
- h) Masih tingginya kemacetan, pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas di daerah hukum Polres Mempawah.

3. Identifikasi Masalah

Berkembangnya lingkungan strategis yang berdampak pada meningkatnya potensi ancaman dan gangguan keamanan dalam bentuk kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan merugikan kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi serta makin tingginya tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme Polri, maka tugas Polres Mempawah pada tahun 2024 diprediksi akan semakin berat terlebih pada tahun 2024 merupakan tahun politik (Pemilu), dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Potensi konflik Pemilu baik pada saat pelaksanaan dan pasca Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024;
- b. Belum seluruhnya personel Polres Mempawah yang berkomitmen untuk integritas dan zero toleran terhadap penyimpangan dan pelanggaran dalam

pelaksanaan tugas sehingga menimbulkan rasa kepercayaan dan harapan serta meningkatkan citra Polri di masyarakat;

- c. proses globalisasi dan kemajuan Iptek juga menghadirkan berbagai ancaman dari segi ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya, perkembangan teknologi
- d. informasi dan lemahnya penegakan hukum menyebabkan maraknya pelanggaran hak cipta melalui dunia maya (*cyber crime*) dan penyebaran informasi hoaks yang melanggar UU IT, yang perlu diantisipasi dengan penguatan Pancasila di tengah kehidupan masyarakat;
- e. Belum seluruhnya personel Polres Mempawah yang berkomitmen untuk meningkatkan profesionalisme kinerja melalui pendidikan baik formal maupun non formal dalam memberantas tindak pidana 4 jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi kontijensi) dan kasus – kasus yang menjadi atensi Pimpinan Polri;
- f. Belum Optimalnya pelaksanaan program Perpolisian Masyarakat (Polmas) dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam menekan potensi terjadinya pelanggaran hukum dan kriminalitas di Daerah Hukum Polres Mempawah;
- g. Belum Optimalnya penanganan kasus yang menjadi atensi pimpinan dan sorotan publik sehingga dapat menjawab tuntutan dan kepuasan masyarakat;
- h. Belum terpenuhinya keadilan dalam proses pembagian kebun plasma karena seiring meningkatnya investasi sektor pertanian dan perkebunan terutama kelapa sawit membutuhkan lahan yang sangat luas, perijinan lahan untuk perkebunan sawit yang dikeluarkan oleh pemerintah tak hanya lahan kritis dan lahan tandus, namun terdapat hutan masyarakat yang ada kepemilikannya / tanah adat. Konflik-konflik yang sudah terjadi menyangkut masalah perkebunan sawit, apakah sudah ada penanganan khusus dan solusi terbaik agar tidak menimbulkan masalah besar;

- i. Belum terbentuknya Polsek Sadaniang guna mewujudkan pelayanan prima Polri kepada masyarakat dan perkuatan keamanan untuk menciptakan stabilitas Kamtibmas di Daerah Hukum Polres Mempawah;
- j. Kualitas pelayanan publik di Polres Mempawah masih perlu ditingkatkan untuk menghindari terjadinya pungutan liar melalui sistem pelaporan dan pelayanan publik yang berbasis teknologi yang modern dan terintegrasi dengan instansi terkait;
- k. Isu terorisme, radikalisme dan penistaan yang dikaitkan dengan agama tertentu, perlu penanganan secara cepat dan tepat;
- l. Penegakan hukum dan pemetaan kejahatan siber berupa penipuan online, pornografi anak dan pencurian data melalui akses Ilegal perlu ditingkatkan Polres Mempawah, mengingat semakin maraknya kasus kejahatan siber yang menjadi perhatian publik perlu untuk ditangani Polres Mempawah secara profesional, serta Polres Mempawah perlu untuk mendorong terciptanya bentuk-bentuk produksi konten kreatif, narasi perdamaian dan merawat kebhinekaan di media sosial.

II.TUJUAN DAN SASARAN

1.VISI dan MISI

a.Visi dan Misi Polda Kalbar

1. Visi Polda Kalbar
"Terwujudnya Kalimantan Barat yang Aman dan Tertib".
2. Misi Polda Kalbar
Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat Kalimantan Barat.

b.Visi dan Misi Polres Mempawah

1. Visi Polres Mempawah
"Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Aman dan Tertib".
2. Misi Polres Mempawah
Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat Kabupaten Mempawah.

2.TUJUAN

a.Tujuan Polda Kalbar

- a) Menjamin terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di seluruh Wilayah Kalimantan Barat;
- b) Menegakkan Hukum secara Berkeadilan;
- c) Modernisasi Pelayanan Polri;
- d) Mewujudkan Polri yang Profesional;
- e) Menerapkan Manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya.

b.Tujuan Polres Mempawah

- a) Menjamin terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di seluruh Wilayah Kabupaten Mempawah;
- b) Menegakkan Hukum secara Berkeadilan;
- c) Modernisasi Pelayanan Polri;
- d) Mewujudkan Polri yang Profesional;
- e) Menerapkan Manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya.

3.SASARAN PRIORITAS

a.Sasaran Prioritas Polda Kalbar

Sasaran Prioritas Polda Kalbar tahun 2024 mengacu kepada Sasaran Prioritas Kapolri yaitu sebagai berikut:

- a. **Pertama** "Mewujudkan Rasa Aman di Tengah Masyarakat dengan Memperkuat Stabilitas Harkamtibmas di Lokasi Rawan Kejahatan";
- b. **Kedua** "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Polri Yang Inovatif";
- c. **Ketiga** "Meningkatkan Kepercayaan Publik melalui Penegakan Hukum yang Transparan dan Akuntabel";
- d. **Keempat** "Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polri;
- e. **Kelima** "Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polri yang modern";
- f. **Keenam** "Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Optimalisasi Pengawasan yang Efektif Berbasis T.I";

b. Sasaran Prioritas Polres Mempawah

Sasaran Prioritas Polres Mempawah tahun 2024 mengacu kepada Sasaran Prioritas Polda Kalbar yaitu sebagai berikut:

- a. **Pertama** "Mewujudkan Rasa Aman di Tengah Masyarakat dengan Memperkuat Stabilitas Harkamtibmas di Lokasi Rawan Kejahatan";
- b. **Kedua** "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Polri Yang Inovatif";
- c. **Ketiga** "Meningkatkan Kepercayaan Publik melalui Penegakan Hukum yang Transparan dan Akuntabel";
- d. **Keempat** "Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polri;
- e. **Kelima** "Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polri yang modern";
- f. **Keenam** "Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Optimalisasi Pengawasan yang Efektif Berbasis T.I";

III.ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kalbar

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polda Kalbar Tahun 2024, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Mewujudkan Rasa Aman di Tengah Masyarakat dengan Memperkuat Stabilitas Harkamtibmas di Lokasi Rawan Kejahatan”**, yaitu:

1) meningkatkan kemampuan deteksi aksi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) analisis keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 3112);

b) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik (prog.Harkamtibmas/Giat 3114);

c) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi (prog.Harkamtibmas/Giat 3115);

d) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya prog.Harkamtibmas/Giat 3116);

e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara (prog.Harkamtibmas/Giat 3117);

f) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan khusus (prog.Harkamtibmas/Giat 3150).

2) menurunkan potensi kejahatan, gangguan Kamtibmas melalui kegiatan pencegahan yang proaktif guna mencegah terjadinya kejahatan;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) pembinaan potensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076);

b) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);

c) penyelenggaraan pengamanan objek vital (prog.Harkamtibmas/Giat 3131);

d) penyelenggaraan kepolisian perairan (prog.Harkamtibmas /Giat 3134);

e) penyelenggaraan kepolisian udara (prog.Harkamtibmas/ Giat 3135);

f) penindakan tindak pidana terorisme (Prog.lidiksidik/Giat 3143);

g) pengelolaan Multimedia (Prog.dukma/Giat 3149).

- 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan “Pemolisian PrediMif” dalam rangka menjaga Stabilitas Harkamtibmas” (Cooling System);

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pembinaan potensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076);
- b) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
- c) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lintas (prog.Harkamtibmas/Giat 3133).

- 4) mengedepankan penanganan konflik secara humanis;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) analis keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 3112);
- b) pembinaan potensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076);
- c) penanggulangan keamanan dalam negeri (prog.Harkamtibmas/Giat 5087);
- d) pelayanan psikologi Anggota Polri (prog.Harkamtibmas/ Giat 3110).

- 5) meningkatkan Gakkum Lintas menggunakan ETLA dan tilang manual serta mengoptimalkan Kamseltibcar lintas guna memberikan rasa aman di tengah masyarakat baik saat terjadi kemacetan dan jam rawan kejahatan;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan;

- a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
- b) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lintas (prog.Harkamtibmas/Giat 3133).

- 6) meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri di lokasi rawan gempa dan bencana;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);

- b) pembinaan potensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076;
- c) penanggulangan keamanan dalam negeri (prog.Harkamtibmas/Giat 5087).

7) melaksanakan kegiatan pengamanan event nasional/ internasional tahun 2024;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pembinaan operasi kepolisian (prog.Harkamtibmas/Giat 5079);
- b) penanggulangan keamanan dalam negeri (prog.Harkamtibmas/Giat 5087);
- c) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas (prog.Harkamtibmas/Giat 3133);
- d) penyelenggaraan pengamanan objek vital (prog.Harkamtibmas/Giat 3131);
- e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya (prog.Harkamtibmas/Giat 3116);
- f) kerja sama keamanan dan ketertiban luar negeri (prog.Harkamtibmas/Giat 3122).

8) meningkatkan penggelaran operasional kepolisian dan back up kewilayahan dalam rangka penanganan konflik sosial; pengamanan unjuk rasa; dan menjalin sinergisitas polisional serta gangguan keamanan bersenjata;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
- b) penanggulangan keamanan dalam negeri (prog.Harkamtibmas/Giat 5087);
- c) pembinaan potensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076);
- d) pembinaan operasi kepolisian (prog.Harkamtibmas/Giat 5079).

9) meningkatkan kerja sama kepolisian dalam/luar negeri guna mendukung Stabilitas Harkamtibmas;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) kerja sama keamanan dan ketertiban K/L (prog.Harkamtibmas/Giat 3120);
- b) kerja sama keamanan dan ketertiban luar negeri (prog.Harkamtibmas/Giat 3122).

- 10) meningkatkan penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di wilayah perbatasan guna mendukung terlaksananya pengamanan laut; Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

penyelenggaraan kepolisian perairan (prog. Harkamtibmas/Giat 3134);

- 11) melaksanakan pengamanan tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pemilihan kepala daerah Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024:

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan

- a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog. Harkamtibmas/Giat 3130);
- b) penyelenggaraan pengamanan objek vital (prog. Harkamtibmas/Giat 3131);
- c) penanggulangan keamanan dalam negeri (prog. Harkamtibmas/Giat 5087);
- d) pengendalian operasi kepolisian (prog.Harkamtibmas/Giat 5080);
- e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik (prog.Harkamtibmas/Giat 3114);
- f) penindakan tindak pidana umum (Prog.lidiksidik/Giat 3142).

- 12) Meningkatkan kehadiran Polri di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog. Harkamtibmas/Giat 3130);

- b) kerja sama keamanan dan ketertiban luar negeri (prog.Harkamtibmas/Giat 3122);
- c) penyelenggaraan kepolisian perairan (prog. Harkamtibmas/Giat 3134).

b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Polri Yang Inovatif**”, yaitu:

- 1) modernisasi fasilitas sarana dan prasarana sentra pelayanan publik yang berbasis TIK serta terintegrasi. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
pengembangan peralatan Polri (Prog.modernisasialmatsus dan saropras Polri/Giat 3084);
- 2) meningkatkan profesionalisme anggota Polri dalam melayani masyarakat (alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan) guna meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) teknologi komunikasi (Prog.dukma/Giat 5055);
 - b) penyelenggaraan teknologi informasi (Prog.dukma/Giat 3071).
- 3) meningkatkan pembangunan ruang SPKT dan RPK yang online dan humanis serta berbasis TIK. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri (Prog.SDM/Giat 3100);
 - b) pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri (Prog.modernisasialmatsus dan saropras Polri/Giat 5062).
- 4) meningkatkan quick response kepolisian sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
 - b) pelayanan Kesehatan Polri (Prog.dukma/Giat 3072).

c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Meningkatkan Kepercayaan Publik melalui Penegakan Hukum yang Transparan dan Akuntabel”**, yaitu:

- 1) meningkatkan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (Prog.lidiksidik/Giat3140);
 - b) penyelenggaraan laboratorium forensik (Prog. lidiksidik/Giat 3141);
 - c) penindakan tindak pidana umum (Prog.lidiksidik/Giat 3142);
 - d) penindakan tindak pidana Narkoba (Prog.lidiksidik/Giat 3144);
 - e) penindakan tindak pidana ekonomi khusus (Prog.lidiksidik/Giat 3145);
 - f) penindakan tindak pidana korupsi (Prog.lidiksidik/Giat 3146);
 - g) penindakan tindak pidana Siber (Prog.lidiksidik/Giat 3151);
 - h) penindakan tindak pidana tertentu (Prog.lidiksidik/Giat 5083);
 - i) penyelenggaraan kepolisian perairan (Prog.lidiksidik/Giat 3134);
 - j) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog. Harkamtibmas/Giat 3130).
- 2) melaksanakan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kemampuan penyidik di era 4.0;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri (Prog.SDM/Giat 3100);
- 3) meningkatkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
pengawasan penyidikan (Prog.lidiksidik/Giat 5086)
- 4) mengoptimalkan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: penyelenggaraan pendataan dan pelayanan informasi kriminal nasional (Prog.lidiksidik/Giat 5084).

d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polri”**, yaitu:

- 1) meningkatkan kualitas 8 standar pendidikan era police 4.0. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: penyelenggaraan kurikulum pendidikan dan latihan Polri (Prog.SDM/Giat 5070);
- 2) mengoptimalkan penggunaan Bisnis Proses Polri dalam pengembangan struktur organisasi Polri. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri (Prog.dukma/Giat 5052)
- 3) meningkatkan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: pengendalian pegawai Polri (Prog.SDM/Giat 3107)
- 4) meningkatkan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) pembinaan pendidikan dan latihan Polri (Prog.SDM/Giat 5069);
 - b) pengendalian pegawai Polri (Prog.SDM/Giat 3107).
- 5) meningkatkan pengelolaan SDM yang humanis. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) manajemen anggaran (Prog.dukma/Giat 5054);
 - b) pembinaan karier personel Polri (Prog.dukma/Giat 3108);
 - c) penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri (Prog.SDM/Giat 3105).
- 6) melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri (Prog.SDM/Giat 3105)

- 7) meningkatkan ketrampilan dan etika Yanlik serta kemampuan komunikasi digital. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri (Prog.SDM/Giat 3100)
 - 8) meningkatkan kesejahteraan melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja bagi aparaturnya Polri. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) pelayanan kesehatan (Prog.dukma/Giat 3072);
 - b) pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri (Prog.modernisasiAlmatsus dan sarpras Polri/Giat 5062);
 - c) penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri (Prog.SDM/Giat 3105).
- e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “**Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polri yang modern**”, yaitu:
- 1) memenuhi sarana dan prasarana dan Almatsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Polri (Prog.dukma/Giat 5067).
 - 2) meningkatkan peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (Bumnis) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan Almatsus Alpalhankam Polri. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Polri (Prog.dukma/Giat 5067);
 - 3) memenuhi rumah dinas pegawai Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas di wilayah perbatasan. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri (Prog. modernisasiAlmatsus dan sarpras Polri/Giat 5062).

- 4) pengembangan Labfor di kewilayahan secara bertahap. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: pengembangan peralatan Polri (Prog. Modernisasi almatsus dan sarpras Polri/Giat 3084).
 - 5) meningkatkan pengembangan Almatsus SCI. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: pengembangan peralatan Polri (Prog. Modernisasi almatsus dan sarpras Polri/Giat 3084);
 - 6) membangun dan menyatukan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) pengembangan peralatan Polri (Prog. Modernisasi almatsus dan sarpras Polri/Giat 3084)
 - b) membangun sistem komunikasi perbatasan dan pulau terluar (Prog. dukma/Giat 5055).
 - 7) mengoptimalkan hotline 110 dalam menerima dan merespon pengaduan/ pelaporan masyarakat. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: pengembangan hotline 110 (Prog. dukma/Giat 5055).
- f. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Optimalisasi Pengawasan yang Efektif Berbasis T.I”**, yaitu:
- 1) menguatkan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis online. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan (Prog. lidiksidik/Giat 3091);
 - b) pengawasan penyidikan (Prog. dukma/Giat 5086);
 - 2) mengoptimalkan Saber Pungli (sapunbersih pungutan liar) di lingkungan internal Polri. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

penyelenggaraan pemeriksaan

dan pengawasan (Prog.dukma/Giat 3091).

- 3) meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) penyelenggaraan pengamanan internat Polri (Prog.dukma/Giat 3089);
 - b) pelayanan administrasi keuangan Polri (Prog.lidiksidik/Giat 3068);
- 4) meningkatkan tata kelola manajemen kinerja perencanaan dan penganggaran Polri yang akuntabel. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) penyusunan kebijakan Polri (Prog.dukma/Giat 5051);
 - b) manajemen anggaran (Prog.dukma/Giat 5054);
 - c) pelayanan administrasi keuangan Polri (Prog.dukma/Giat 3068);
- 5) menata kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar efektif dan efisien sesuai dengan Bisnis Proses Polri. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri (Prog.dukma/Giat 5052).
- 6) meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

Reformasi Birokrasi Polri (Prog.dukma/Giat 5053).

2. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Mempawah

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polres Mempawah Tahun 2023, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi Polres Mempawah sebagai berikut:

a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Mewujudkan Rasa Aman di Tengah Masyarakat dengan Memperkuat Stabilitas Harkamtibmas di Lokasi Rawan Kejahatan”**, yaitu:

- 1) Meningkatkan kemampuan deteksi aksi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) analisis keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 3112);
 - b) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik (prog.Harkamtibmas/Giat 3114);
 - c) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi (prog.Harkamtibmas/Giat 3115);
 - d) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya prog.Harkamtibmas/Giat 3116);
 - e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara (prog.Harkamtibmas/Giat 3117).
- 2) menurunkan potensi kejahatan, gangguan Kamtibmas melalui kegiatan pencegahan yang proaktif guna mencegah terjadinya kejahatan;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pembinaan potensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076);
 - b) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
 - c) penyelenggaraan pengamanan objek vital (prog.Harkamtibmas/Giat 3131);
 - d) penyelenggaraan kepolisian perairan (prog.Harkamtibmas /Giat 3134);
 - g) penerangan masyarakat (Prog.dukma/Giat 3070).
- 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan “Pemolisian PrediMif” dalam rangka menjaga Stabilitas Harkamtibmas” (Cooling System);
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pembinaan potensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076);
 - b) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
 - c) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas (prog.Harkamtibmas/Giat 3133).
- 4) mengedepankan penanganan konflik secara humanis;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) analisis keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 3112);
 - b) pembinaan potensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076);

- 5) meningkatkan Gakkum Lantas menggunakan ETLE dan tilang manual serta mengoptimalkan Kamseltibcar lantas guna memberikan rasa aman di tengah masyarakat baik saat terjadi kemacetan dan jam rawan kejahatan;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan;
- a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
 - b) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas (prog.Harkamtibmas/Giat 3133).
- 6) meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri di lokasi rawan gempa dan bencana;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
 - b) pembinaan potensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076);
- 7) melaksanakan kegiatan pengamanan event nasional tahun 2024;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pembinaan operasi kepolisian (prog.Harkamtibmas/Giat 5079);
 - b) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas (prog.Harkamtibmas/Giat 3133);
 - c) penyelenggaraan pengamanan objek vital (prog.Harkamtibmas/Giat 3131);
 - d) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya (prog.Harkamtibmas/Giat 3116).
- 8) meningkatkan penggelaran operasional kepolisian dan back up kewilayahan dalam rangka penanganan konflik sosial; pengamanan unjuk rasa; dan menjalin sinergisitas polisional serta gangguan keamanan bersenjata;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
 - b) pembinaan potensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076);
 - c) pembinaan operasi kepolisian (prog.Harkamtibmas/Giat 5079).

9) meningkatkan penggelaran patroli kapal Polri di wilayah perairan guna mendukung terlaksananya pengamanan laut;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

penyelenggaraan kepolisian perairan (prog. Harkamtibmas/Giat 3134);

10) melaksanakan pengamanan tahapan Pemilu 2024:

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan

a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog. Harkamtibmas/Giat 3130);

b) penyelenggaraan pengamanan objek vital (prog. Harkamtibmas/Giat 3131);

c) pengendalian operasi kepolisian (prog. Harkamtibmas/Giat 5080);

d) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik (prog. Harkamtibmas/Giat 3114);

e) penindakan tindak pidana umum (Prog. lidiksidik/Giat 3142).

11) Meningkatkan kehadiran Polri di wilayah pedalaman dan pulau tidak berpenghuni. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog. Harkamtibmas/Giat 3130);

b) penyelenggaraan kepolisian perairan (prog. Harkamtibmas/Giat 3134).

b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Polri Yang Inovatif”**, yaitu:

1) meningkatkan profesionalisme anggota Polri dalam melayani masyarakat (alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan) guna meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

penerangan masyarakat (Prog. dukma/Giat 3070).

2) meningkatkan quick response kepolisian sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog. Harkamtibmas/Giat 3130);

c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Meningkatkan Kepercayaan Publik melalui Penegakan Hukum yang Transparan dan Akuntabel”**, yaitu:

1)meningkatkan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (Prog.lidiksidik/Giat3140);
- b) penyelenggaraan laboratorium forensik (Prog. lidiksidik/Giat 3141);
- c) penindakan tindak pidana umum (Prog.lidiksidik/Giat 3142);
- d) penindakan tindak pidana Narkoba (Prog.lidiksidik/Giat 3144);
- e) penindakan tindak pidana korupsi (Prog.lidiksidik/Giat 3146);
- f) penyelenggaraan kepolisian perairan (Prog.lidiksidik/Giat 3134);
- g) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog. Harkamtibmas/Giat 3130).

2)meningkatkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

pembinaan operasional penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (Prog.lidiksidik/Giat 5082)

d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polri”**, yaitu:

1) mengoptimalkan penggunaan Bisnis Proses Polri dalam pengembangan struktur organisasi Polri. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

Reformasi Birokrasi Polri (Prog.dukma/Giat 5053).

2) meningkatkan pengelolaan SDM yang humanis. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

manajemen anggaran (Prog.dukma/Giat 5054).

e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “**Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polri yang modern**”, yaitu:

memenuhi sarana dan prasarana dan Almatsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Polri (Prog.modernisasi almatsus sarpras polri/Giat 5059).

f. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “**Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Optimalisasi Pengawasan yang Efektif Berbasis T.I**”, yaitu:

1) menguatkan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis online. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan (Prog.dukma/Giat 3091).

2) mengoptimalkan Saber Pungli (sapu bersih pungutan liar) di lingkungan internal Polri. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan (Prog.dukma/Giat 3091).

3) meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: penyelenggaraan pengamanan internal Polri (Prog.dukma/Giat 3089);

4) meningkatkan tata kelola manajemen kinerja perencanaan dan penganggaran Polri yang akuntabel. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

manajemen anggaran (Prog.dukma/Giat 5054);

5) menata kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar efektif dan efisien sesuai dengan Bisnis Proses Polri. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

Reformasi Birokrasi Polri (Prog.dukma/Giat 5053).

6) meningkatkan kualitas pelayanan

publik Polri melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

Reformasi Birokrasi Polri (Prog.dukma/Giat 5053).

IV.PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF POLRES MEMPAWAH T.A.2024

1. Program dan Kegiatan

a. Program Dukungan Manajemen

1) Tujuan:

Terwujudnya *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas; pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian; sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi serta kerja sama lintas sektor.

2) Kegiatan:

- a) penerangan masyarakat;
- b) dukungan pelayanan internal perkantoran Polri;
- c) pertanggungjawaban profesi;
- d) penyelenggaraan pengamanan internal Polri;
- e) penegakan tata tertib dan disiplin Polri;
- f) penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan;
- g) pemberian bantuan dan nasehat hukum;
- h) kerjasama dan penyuluhan hukum;
- i) reformasi dan birokrasi Polri
- j) manajemen anggaran
- k) pengelola informasi dan dokumentasi

b. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polres Mempawah

1) Tujuan:

Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi Almatsus dan sarana prasarana Polres Mempawah guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi bidang pembinaan dan operasional;

2) Kegiatan:

- dukungan manajemen dan teknis Sarpras;

c. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1) Tujuan:

Terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi kepolisian serta kerja sama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi deteksi aksi, preemtif dan preventif.

2) Kegiatan:

- a) analisis keamanan;
- b) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik;
- c) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi
- d) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya
- e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara
- f) dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
- g) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara
- h) penyelenggaraan pengamanan objek vital
- i) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas;
- j) penyelenggaraan kepolisian perairan
- k) pembinaan potensi keamanan
- l) pengendalian operasi kepolisian

d. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana (060.01.BI).

1) Tujuan:

Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2) Kegiatan:

- a) penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;

- b) penyelenggaraan laboratorium forensik;
- c) penindakan tindak pidana umum;
- d) penindakan tindak pidana narkoba;
- e) penindakan tindak pidana korupsi;
- f) penindakan tindak pidana perairan;
- g) penindakan tindak pidana lalu lintas;
- h) pembinaan operasional penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

2. Pagu Indikatif Polres Mempawah T.A. 2024

Alokasi Pagu Indikatif Polres Mempawah T.A. 2024 sebesar Rp. 50.742.190.000,- (*Lima Puluh miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) mengalami penurunan sejumlah Rp. 4.118.218.000,- (*Empat Miliar Seratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*) atau turun 8,1% dibandingkan dengan alokasi pagu indikatif Polres Mempawah T.A. 2023 sebesar Rp. 54.860.408.000,- (*Lima Puluh Empat miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah*). Adapun rincian Pagu Indikatif Polres Mempawah T.A. 2024 sebagai berikut:

- 1) rincian Pagu Indikatif Polri T.A. 2024 per jenis Belanja sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp)
a.	Belanja Pegawai	38.580.926.000
b.	Belanja Barang	16.260.017.000

- 2) rincian Pagu Indikatif T.A. 2024 per sumber anggaran sebagai berikut:

No.	Sumber Anggaran	Pagu (Rp)
a.	Rupiah Murni	53.502.937.000
b.	PNBP	1.338.006.000

rincian Pagu Indikatif T.A. 2024 per Program sebagai berikut:

No.	Program	Pagu (Rp)
a.	Program Dukungan Manajemen	3.467.786.000
b.	Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	2.998.527.000

d.	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	8.237.235.000
e.	Program Penyelidikan dan Penyidikan Pidana Tindak	3.467.786.000

- 3) kegiatan yang berdasarkan Pagu Indikatif Polres Mempawah T.A. 2024
- a) mengakomodir kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan termasuk tunjangan kinerja, pemenuhan *Intake* Polres Mempawah tahun 2024, namun Pagu indikatif ini belum termasuk untuk penambahan tunjangan kinerja sampai dengan 80%;
 - b) mendukung kegiatan operasional anggaran perkantoran (antara lain: biaya pemeliharaan, BMP dan jasa serta keperluan sehari-hari perkantoran);
 - c) mendukung kegiatan fungsi teknis kepolisian, berupa: deteksi potensi gangguan keamanan, pencegahan dan penanggulangan keamanan, pembinaan pelayanan dan perlindungan masyarakat, penegakkan hukum, pengamanan kegiatan masyarakat serta mendukung tercapainya prioritas Polres Mempawah tahun 2024;
 - d) mendukung penguatan sarana prasarana dalam rangka peningkatan profesionalisme SDM Polri, meningkatkan pelayanan publik Polri, penanganan gejala/konflik sosial, penanganan flash point, terorisme, penyebaran berita hoaks dan penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan penanganan peristiwa yang berimplikasi kontinjensi, Alamsus Polres Mempawah, pemenuhan fasilitas Polres Mempawah, fasilitas kantor serta pembangunan perumahan negara bagi personel Polri di Polres Mempawah dan jajaran;
 - e) mengusulkan personil mengikuti pelatihan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kapabilitas personel Polres Mempawah baik dibidang fungsi pembinaan maupun operasional agar semakin presisi;
 - f) meningkatkan kegiatan preemtif dan preventif secara maksimal dengan mengoptimalkan petugas Bhabinkamtibmas melalui strategi Polmas dalam menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas;

- g) meningkatkan jam layar Patroli guna mencegah dan menanggulangi gangguan keamanan di wilayah perairan laut Kabupaten Mempawah;
- h) meningkatkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli pada tempat-tempat dan jam rawan gangguan Kamtibmas;
- i) melaksanakan penyusunan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Polres Mempawah serta pemberian advokasi terhadap institusi Polri, personel Polri maupun keluarga Polri di Polres Mempawah;
- j) mengakomodir dan mendukung kegiatan Program Prioritas Kapolres Mempawah.
 - a) menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0;
 - b) perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0;
 - c) pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas;
 - d) peningkatan kinerja penegakan hukum;
 - e) penguatan penanganan konflik sosial;
 - f) peningkatan kualitas pelayanan publik Polri;
 - g) mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegritas;
 - h) pemantapan komunikasi publik;
 - i) pengawasan pimpinan terhadap setiap kegiatan;
 - j) penguatan fungsi pengawasan;
 - k) pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan (*public complain*).

V.PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Kepolisian Resor Mempawah T.A. 2024 disusun, sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan penetapan Pagu Indikatif Polres Mempawah T.A. 2025.

Ditetapkan di : Mempawah
pada tanggal : 29 Agustus 2023

KEPALA KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH



SUDARSONO, S.I.K., M.Si.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76081054

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) POLRES MEMPAWAH
T.A. 2024**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Ket
SI	Terwujudnya keamanan dan ketertiban Kabupaten Mempawah	SI	Indeks Keamanan dan Ketertiban Kabupaten Mempawah	4,4	Sasaran impact
SS1	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	IKU1	Indeks Harkamtibmas	92,59	
SS2	Penegakkan hukum secara berkeadilan	IKU2	Indeks Gakkum	93,99	
SS3	Profesionalisme SDM Polres Mempawah	IKP1	Indeks Profesionalitas SDM Polres Mempawah	85	
SS4	Modernisasi teknologi	IKP2	Persentase kepuasan penggunaan Alkom Polres Mempawah	95%	
		IKP3	Persentase pemenuhan Almatsus Polres Mempawah	95%	
		IKP4	Persepsi kemudahan Akses Data	4	
SS5	Pengawasan yang Akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani	IKP5	Nilai AKIP	80	
		IKP6	Nilai Reformasi Birokrasi	90	
		IKP7	Nilai Kinerja Anggaran	100	
		IKP8	Presentase penanganan pengaduan masyarakat	100%	
		IKP9	Presentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polres Mempawah	100%	

Ditetapkan di : Mempawah
pada tanggal : 29 Agustus 2023

KEPALA KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH


SUDARSONO, S.T.K., M.Si.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76081054

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR MEMPAWAH

REKAP 1: K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2024

1. **KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH
2. **VISI** : Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Aman dan Tertib
3. **MISI** : Melindungi, Melayani, dan Mengayomi Masyarakat
4. **PRIORITAS NASIONAL**
5. **SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L**

KOD E	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	4,4	50.742.190.000
01.01	Indeks Harkamtibmas	92,59	
02	Penegakkan hukum secara berkeadilan		
02.01	Indeks Gakkum	93,99	
03	Profesionalisme SDM		
03.01	Indeks Profesionalitas SDM Polres Mempawah	85	
04	Modernisasi Teknologi		
04.01	Persentase kepuasan penggunaan Alkom	95%	
04.02	Persentase Pemenuhan Almatsus	95%	
04.04	Persepsi kemudahan akses data	4	

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
05	Pengawasan yang akuntabel, Bersih Terbuka, dan Melayani		
05.01	Nilai AKIP	80	
05.03	Nilai Reformasi Birokrasi	90	
05.05	Nilai Kinerja Anggaran	100	
05.06	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100 %	
05.07	Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri	100 %	
Total			

Mempawah, 29 Agustus 2023



KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH

SU HARSONO, S.I.K., M.Si

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76081054

REKAP 2: PROGRAM K/L
 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
 TAHUN ANGGARAN 2024

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH
 2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 02 - Penegakkan hukum secara berkeadilan
 3. PROGRAM : Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
 4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2024 (RIBU)
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	
07.05	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	
Total		

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2024	ALOKASI 2024(RIBU)
01	terciptanya keadilan penegakkan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi	283	3.467.786.000
01.01	Persentase pengungkapan tindak pidana konvensional.	157	
01.02	Persentase pengungkapan tindak pidana transnasional.	27	
01.03	Persentase pengungkapan tindak pidana terhadap kekayaan negara,	3	
01.04	Persentase peningkatan pengungkapan tindak pidana yg berimplikasi kontinjensi.	0,-	
01.04	Persentase peningkatan pengungkapan tindak pidana perairan.	1,-	
01.04	Persentase peningkatan pengungkapan tindak pidana lalu lintas.	95,	
Total			3.467.786.000

REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2024

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 04 - Modernisasi Teknologi
3. PROGRAM : Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri
4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2024 (RIBU)
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	0,0
07.05	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	
Total		

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	terselenggaranya operasional Polri yang optimal dalam pelaksanaan harkamtibmas dan gakkum serta Layanan Internal		2.998.527.000,-
01.01	persentase pemanfaatan Almatsus dan Sarpras		
Total			

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	Almatsus dan Sarpras	2.998.527.000,-
01.01	persentase pemenuhan Almatsus dan Sarpras	
Total		2.998.527.000,-

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
		RP	PN BP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	2.998.527.000, -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,401,103,000
Total		2.998.527.000, -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,401,103,000

Mempawah, 29 Agustus 2023

KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH


 KEPALA
 SU HARSONO. S.I.K., M.Si
 ATUN BONGSARIS BESAR POLISI NRP 76081054

REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2024

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 01 - Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
3. PROGRAM : Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2024 (RIBU)
02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	0,0
02.04	Pembangunan Wilayah Kalimantan	
Total		0,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	Terjaganya ketertiban sosial dalam masyarakat sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitasnya dalam kondisi bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan		8,237,235,000
01.01	Terjaganya ketertiban sosial dalam masyarakat sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitasnya dalam kondisi bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan		
Total			8,237,235,000

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	layanan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	
01.01	Indeks Harkamtibmas	
Total		8,237,235,000

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRA M	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
		RP	PNB P	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
3112	Analisis Keamanan	221,607,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,607,000
3114	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik	194,004,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,004,000
3115	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi	224,060,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,060,000
3116	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang SosialBudaya	231,448,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,448,000
3117	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara	303,722,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	303,722,000
3128	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan danKetertiban Masyarakat	2,995,396,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,995,396,000
3130	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	303,624,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	303,624,000
3131	Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital	196,800,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,800,000
3133	Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat diBidang Lintas	527,525,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	527,525,000
3134	Penyelenggaraan Kepolisian Perairan	15,000,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,000,000
5076	Pembinaan Potensi Keamanan	1,906,964,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,906,964,000
5079	Pembinaan Operasi Kepolisian	1,002,385,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,002,385,000
5080	Pengendalian Operasi Kepolisian	114,700,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,700,000

KODE	PROGRA M	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
		RP	PNB P	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
Total		8,237,235,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,237,235,000

Mempawah, 29 Agustus 2023

KAPOLRES POLISIAN RESOR MEMPAWAH

 SUWARSONO. S.I.K. M.Si
 4000 KOMSARIS BESAR POLISI NRP 76081054

REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN
ANGGARAN 2024

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 05 - Sistem pengawasan yang akuntabel, Bersih Terbuka, dan Melayani
3. PROGRAM : Program Dukungan Manajemen
4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2024 (RIBU)
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	0,0
07.05	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	
Total		

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	terselenggaranya dukungan manajemen kepada internal Polri yang memenuhi standar pelayanan		36,038,642,000
01.01	persentase pemenuhan layanan internal yang berkualitas		
Total			36,038,642,000

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	layanan kepada internal Polri	36.038.642.000
01.01	Jumlah layanan yang di berikan sesuai SOP	
Total		36.038.642.000

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
3070	Penerangan Masyarakat	84.390.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84.390.000
3073	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri	35.752.639.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35.752.639.000
3088	Pertanggungjawaban Profesi	27.109.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27.109.000
3089	Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri	29.000.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29.000.000
3090	Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri	24.722.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24.722.000
3091	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan	39.496.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39.496.000
3154	Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum	15.000.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.000.000

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
3155	Kerjasama dan Penyuluhan Hukum	15.000.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.000.000
5053	Reformasi Birokrasi Polri	42.899.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42.899.000
5054	Manajemen Anggaran	7.387.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.387.000
5056	Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1.000.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000
Total		36.038.642.000	0,0	0,0	0,					0,0	0,0	36.038.642.000

Mempawah, 29 Agustus 2023

KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH
 KEPALA

 SUARSONO, S.I.K., M.Si
 ATUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76081054